

**PENGARUH TIPE KEPEMILIKAN DAN MANAJEMEN LABA
TERHADAP PEMILIHAN KAP DAN PENETAPAN *FEE*
AUDIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

**(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Anugerah Endriawan

NIM. 12030110141010

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Anugerah Endriawan

Nomor Induk mahasiswa : 12030110141010

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH TIPE KEPEMILIKAN DAN
MANAJEMEN LABA TERHADAP
PEMILIHAN KAP DAN PENETAPAN *FEE*
AUDIT PADA PERUSAHAAN YANG
TERDAFTAR DI BEI (Studi Empirik Pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
BEI tahun 2011-2013).**

Dosen Pembimbing : Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D.

Semarang, 2 September 2014

Dosen Pembimbing

Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D.
NIP 19650520 199001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Anugerah Endriwan

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141010

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnins/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH TIPE KEPEMILIKAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PEMILIHAN KAP DAN PENETAPAN *FEE* AUDIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2013).**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 Oktober 2014

Tim Penguji:

1. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
2. Dr. Hj, Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
3. Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Anugerah Endriawan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH TIPE KEPEMILIKAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PEMILIHAN KAP DAN PENETAPAN *FEE* AUDIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2013)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang melanggar peraturan dalam penulisan skripsi dalam hal tersebut baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang , 4 September 2014

Yang membuat pernyataan

(AnugerahEndriawan)

NIM: 12030110141046

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka
surat Ar-Ra'd ayat 11

Segala tantangan dan kegagalan hari ini adalah harga yang wajib kita bayar untuk keberhasilan dan kemenangan hari esok

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan :

Untuk kedua orang tuaku,

Untuk adik-adikku,

Untuk semua keluargaku,

Untuk teman-teman dan para pengajar,

Terima kasih atas semua bantuan, doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor tipe kepemilikan dan manajemen laba yang dapat mempengaruhi pemilihan KAP dan penetapan *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan KAP dan *fee* audit adalah tipe kepemilikan perusahaan dibedakan menjadi perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, serta perusahaan institusional yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh intitusi keuangan, dan manajemen laba diukur dengan *discretionary accruals Modified Jones* (2010).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh sampel laporan keuangan perusahaan sebanyak 132 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 2 uji regresi, yaitu uji regresi logistik dan uji regresi linier berganda. Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, data terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepemilikan BUMN, institusional dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pemilihan KAP serta tipe kepemilikan BUMN dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Namun pada variabel tipe kepemilikan institusional dan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit.

Kata kunci: *fee* audit, pemilihan KAP, tipe kepemilikan, dan manajemen laba

ABSTRACT

This study aims to examine the factors of type of ownership and earnings management that may affect the selection of the firm and the determination of the audit fee on companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). Factors that influence the selection of the firm and the audit fee is the type of ownership of the company is divided into a company that is majority owned by the government, as well as institutional company largely owned by the financial institution, and earnings management measured by discretionary accruals Modified Jones (2010).

This study uses secondary data from financial statements companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013. By using purposive sampling method obtained a sample of 132 financial statements of the company. This study used two regression, ie logistic regression and multiple linear regression. Before performing the multiple linear regression, the data first tested using the classical assumption test

The results of this study indicate that the type of ownership of state-owned enterprises, institutional and earnings management has no effect on the selection of public accounting firm as well as the type of state enterprises ownership and earnings management does not affect the audit fee. Variable types of institutional ownership and earnings management positive and significant impact on audit fees.

Keywords: audit fees, the selection of a public accounting firm, type of ownership, and earnings management.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pengaruh Tipe Kepemilikan dan Manajemen Laba Terhadap Pemilihan KAP dan Penetapan Fee Audit (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)”. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro..

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. atas segala kenikmatan, berkah, rahmat, dan hidayahNya yang tak terhingga.
2. Kedua orang tua saya tercinta, bapak Indriyatmoko dan ibu Eli Atik Lesmana, yang telah memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus serta telah berkorban segalanya dalam memberikan nasihat, arahan, dan semuanya selama ini
3. Adik-adik tersayang, Haqni Putri Indriani dan Nadhia Lesmana, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan FakultasEkonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

6. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih atas ilmu, dukungan, bimbingan, dan waktu yang telah ibu berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
7. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt Selaku dosen wali penulis, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan dukungan untuk penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman serigala terakhir (Rahardian, Lubis, Marcel, Gelar, Amirul, Amrullah, Arif, Bhagas, Dhanindra, Fahmi, Fajar, Frans, Hendra, Rio, Roshella), terima kasih sebesar-besarnya atas semangat, dukungan dan doanya
11. Teman-teman lama saya, Doddy, Abimanyu, Titus, dan Ganang yang selama ini menemani dan selalu memberi semangat
12. Teman seperjuangan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi M. Armidla S, yang memberi dukungan dala menyelesaikan skripsi
13. Teman-teman kelas B yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama perkuliahan di Universitas Diponegoro.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro angkatan 2010, terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan selama penulis menempuh perkuliahan.

15. Keluarga KKN Desa Rowosari 2013 (Herga, Satria, Rini, Felicia, Ay, Nova, Lis) yang memberikan dukungan dan saran dalam penulisan skripsi.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari banyak pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan program Sarjana di Universitas Diponegoro, baik yang telah disebutkan dan belum disebutkan. Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 4 September 2014

Penulis

Anugerah Endriawan

NIM: 12030110141010

Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Keagenan.....	14
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.3 Definisi GCG.....	17
2.1.4 Prinsip GCG.....	19

	2.1.5	Tipe Kepemilikan.....	20
	2.1.6	Kepemilikan Institusional.....	22
	2.1.7	Manajemen Laba.....	22
	2.1.8	Faktor Manajemen Laba.....	24
	2.1.9	Motivasi dan Pola Manajeme Laba.....	24
	2.1.10	Kantor Akuntan Publik.....	29
	2.1.11	Fee Audit.....	30
	2.2	Penelitian Terdahulu.....	31
	2.3	Kerangka Pemikiran.....	34
	2.4	Pengembangan Hiptesis.....	35
BAB III		METODE PENELITIAN.....	41
	3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	41
	3.1.1	Variabel Dependen.....	41
	3.1.2	Variabel Independen.....	43
	3.1.3	Variabel Kontrol.....	46
	3.2	Populasi dan Sampel.....	49
	3.3	Jenis dan Sumber Data.....	49
	3.4	Metode Pengumpulan Data.....	50
	3.5	Metode Analisis.....	50
	3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	50
	3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	50
	3.5.2.1	Uji Normalitas Data.....	51
	3.5.2.2	Uji Multikolinearitas.....	52
	3.5.2.3	Uji Heterokedastisitas.....	53
	3.5.2.4	Uji Autokorelasi.....	53

	3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	54
		3.5.3.1 Regresi Logistik.....	55
		3.5.3.2 Regresi Linier Berganda.....	58
	3.5.4	Persamaan Regresi.....	60
BAB IV		HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
	4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	62
		4.1.1 Data Outlier.....	63
	4.2	Analisis Data.....	65
		4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	65
		4.2.2 Analisis Regresi Berganda.....	68
		4.2.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	69
		4.2.2.2 Uji Model.....	74
		4.2.3.3 Uji Hipotesis.....	75
		4.2.4 Analisis Regresi Logsitik.....	79
		4.2.4.1 Uji Kelayakan Model.....	79
		4.2.4.2 <i>Overall Fit Test</i>	81
		4.2.4.3 Koefisien Determinasi.....	82
		4.2.4.4 Uji Hipotesis.....	82
	4.3	Intrepretasi Hasil.....	86
BAB V		KESIMPULAN.....	93
	5.1	Kesimpulan.....	93
	5.2	Keterbatasan.....	94
	5.3	Saran.....	94
		DAFTAR PUSTAKA.....	96

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1	Pengambilan Sampel Penelitian.....	61
Tabel 4.2	Identifikasi outlier.....	63
Tabel 4.3	Statistik Deskripsi Penelitian.....	64
Tabel 4.4	Kepemilikan BUMN.....	66
Tabel 4.5	Kepemilikan Institusi.....	66
Tabel 4.6	Anak Perusahaan.....	67
Tabel 4.7	Kantor Akuntan Publik.....	67
Tabel 4.8	Uji Normalitas.....	70
Tabel 4.9	Uji Multikolinieritas.....	71
Tabel 4.10	Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.11	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	73
Tabel 4.12	Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	74
Tabel 4.14	Hasil Uji t.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Hasil Uji P-Plot Regression Standardized Residual.....	69
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Penelitian.....	98
Lampiran B Hasil Zscore.....	104
Lampiran C Hasil Statistik Deskriptif.....	110
Lampiran D Hasil Uji Normalitas.....	113
Lampiran E Hasil Uji Multikolinearitas.....	115
Lampiran F Hasil Uji Heterokedastisitas.....	116
Lampiran G Hasil Uji Autokorelasi.....	117
Lampiran H Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	117
Lampiran I Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	118
Lampiran J Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual.....	118
Lampiran K Hasil Uji Regresi Logistik.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan suatu entitas merupakan gambaran dari keadaan seluruh kegiatan ekonomi perusahaan. Dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, kebutuhan informasi akan laporan keuangan akan meningkat. Adanya laporan keuangan dapat membantu semua pihak yang terkait dalam perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Keberadaan laporan keuangan sangat berguna bagi para pihak yang terkait untuk pengambilan keputusan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan harus *relevant* dan *reliable*, sehingga dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Disnilah peran dari auditor independen untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit lebih memberikan keyakinan akan informasi yang *relevant* dan *reliable*, sehingga tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan. Jasa audit yang diberikan oleh auditor independen memiliki peran penting dalam menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan.

Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib melakukan perikatan dengan akuntan publik, sesuai dengan Keputusan Dewan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004. Jasa audit merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan suatu entitas, dimana dalam hal ini jasa auditor yang melakukannya adalah auditor eksternal. Jasa audit terbagi dalam 4 jenis jasa yaitu, auditor internal, auditor eksternal, auditor

forensik dan auditor pemerintahan. Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Dopuch dan Sumunic, 1982). Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik yang melakukan perikatan dengan perusahaan pada periode tertentu. Ada empat jenis opini yang diterbitkan oleh auditor independen, yaitu laporan berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan auditor tidak memberikan pendapat. Opini yang dikeluarkan oleh auditor terhadap klien sesuai dengan bukti-bukti objektif yang dikumpulkan atas peristiwa ekonomi yang terjadi pada perusahaan klien. Opini dalam laporan keuangan menunjukkan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang berkualitas akan menggambarkan kinerja perusahaan yang baik dan tidak ada kecurangan dalam proses pelaporan keuangan. Informasi keuangan yang tercermin pada laporan keuangan akan disajikan oleh manajemen kepada pihak terkait sehingga isi dari laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, kemungkinan adanya pengaruh kepentingan pribadi pihak manajemen dalam menyajikan informasi dan posisi keuangan yang menguntungkan pihak manajemen dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu jasa profesional auditor dari kantor akuntan publik sangat diperlukan untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh perusahaan terkait akan melakukan proses audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Secara umum auditing menurut (Mulyadi, 2009) adalah :

suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Kantor akuntan publik yang telah melakukan perikatan pada periode tersebut, akan melakukan proses audit secara berurutan mulai dari tahap perencanaan audit, tahap pelaksanaan audit dan tahap pelaporan. Pemilihan kantor akuntan publik dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut selama tidak melanggar etika profesional dan dapat menjaga independensi. Perusahaan dapat menggunakan kantor akuntan publik yang sama secara berurutan maksimal enam tahun dan untuk auditor maksimal tiga kali berturut-turut. Perikatan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dan klien memiliki tujuan yang ingin dicapai diantara keduanya. Perusahaan klien yang memilih jasa KAP tertentu untuk memperoleh hasil audit yang berkualitas dan dapat menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang akan dipublikasikan sesuai peraturan BEI. Pihak kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit bertujuan untuk memperoleh penghasilan berupa fee audit dari klien yang tetap memperhatikan etika profesional dan independensi.

Di Indonesia terdapat banyak kantor akuntan publik yang beroperasi, secara umum kantor akuntan publik dibagi menjadi KAP *big four* dan *non-big four*. Terbaginya KAP menjadi dua ini karena adanya afiliasi KAP lokal dengan

KAP yang memiliki *brand* terkenal. KAP yang tergolong *big four* telah memiliki reputasi yang baik dan kredibilitas dibanding KAP lainnya. Adanya kecenderungan perusahaan besar akan memilih KAP *big four* untuk mendapatkan kualitas audit yang baik, dimana KAP *big four* memiliki reputasi yang sangat baik dan diakui di seluruh dunia. Selain berdasarkan kualitas audit, perusahaan juga mempertimbangkan besarnya fee dalam memilih auditor. Fee merupakan hal yang sangat penting, banyak perusahaan di Indonesia yang lebih mementingkan besarnya fee audit daripada kualitas audit yang dihasilkan. Ada salah satu contoh fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai profesi akuntan publik, yaitu seperti kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang melakukan kesalahan dalam proses audit, sehingga Menteri Keuangan RI memberikan sanksi berupa pembekuan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) mengenai laporan keuangan konsolidasi PT. Great River pada tahun 2003. Dalam kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai fee audit yang diberikan oleh perusahaan klien apakah akan mempengaruhi opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik. Perikatan jasa audit antara perusahaan klien dan kantor akuntan publik harus berjalan secara profesional dan sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik. Disisi lain perusahaan klien memberikan fee audit sebagai imbal jasa, namun sebagai akuntan publik harus tetap memperhatikan kode etik akuntan publik.

Penetapan fee audit merupakan imbal jasa yang didapat oleh kantor akuntan publik atas jasa audit yang dilakukannya. Menurut Kode Etik Akuntan

Publik tahun 1986 Bab VII pasal 20 disebutkan bahwa seorang akuntan publik berhak menerima honorarium untuk kemahiran pengetahuan yang ia berikan kepada pekerjaan profesional. Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Mulyadi, 2002). Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan, banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan basis penetapan *fee* yang disepakati.

Banyak faktor yang mempengaruhi *fee* audit. Menurut Simunic (1980) faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, D/E, *ligitation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*). Namun faktor yang paling menentukan yang mempengaruhi besarnya audit *fee* adalah ukuran perusahaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi audit *fee* adalah corporate governance. Cadbury committee (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan.

Masalah yang terjadi berawal dari konflik keagenan, yang dapat diatasi dengan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengelolaan perusahaan yang baik akan berdampak pada kinerja perusahaan yang sehat. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Corporate governance yang mengandung empat unsur penting seperti yang diuraikan oleh Economic Co-Operation and Development (OECD) yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan.

Simunic (1980) faktor yang paling menentukan besarnya audit fee adalah ukuran perusahaan. Menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlah aset yang besar akan membuat waktu audit yang dilakukan oleh auditor independen semakin lama, sehingga audit fee yang dibayarkan tinggi. Menurut Beams (2000), perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang banyak di dalam negeri maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi. Hay et al (2008) juga menyatakan terdapat hubungan yang positif signifikan antara anak perusahaan dengan besar penetapan *fee* audit eksternal.

Pada penelitian Arifur Khan (2009) mengenai perusahaan yang dikelola oleh keluarga, audit fee dan pemilihan auditor, menunjukkan hasil bahwa perusahaan keluarga lebih tinggi membayar audit fee dan lebih memilih KAP big four daripada perusahaan yang tidak dikendalikan oleh keluarga. Ghosh (2010) melakukan penelitian, yang mengambil objek penelitian perusahaan manufaktur di India pada tahun 2005. Penelitian Ghosh menguji pengaruh tipe kepemilikan, multiple auditor dan manajemen laba terhadap pemilihan auditor domestik dan besarnya audit fee. Perusahaan yang melakukan manajemen laba cenderung akan memilih perikatan dengan auditor domestik dan juga akan meningkatkan besarnya audit fees.

Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh dari tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap pemilihan kantor akuntan publik dan fee audit. Manajemen laba menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Beneish (2001) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan para *stakeholders* tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan. Namun manajemen laba tidak selalu diartikan hal yang negatif atau menyimpang, hal ini dikatakan oleh Nini (2009), meskipun secara prinsip, praktik manajemen laba tidak menyalahi aturan-aturan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, namun dengan adanya praktik manajemen laba dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan. Hal yang mungkin digunakan manajemen

untuk melakukan manajemen laba adalah fleksibilitas dalam mengimplementasikan prinsip akuntansi yang berterima umum yang menyebabkan manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dari beberapa pilihan kebijakan yang ada (Subramanyam, 1996). Manajemen laba yang dilakukan oleh *agents* dapat mengurangi kepercayaan oleh *principal* mengenai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan, ini dapat mengakibatkan adanya masalah agensi yang terjadi di perusahaan. Disini peran dari auditor eksternal sangat diperlukan untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan, serta mengurangi salah saji material. Laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen lebih dapat dipercaya oleh *principal*, sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Tipe kepemilikan juga merupakan faktor yang menentukan pemilihan auditor dan fee audit. Tipe kepemilikan dibagi menjadi badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan badan usaha asing. Namun dalam penelitian ini tipe kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan pemerintah (BUMN) dan kepemilikan institusional. Menurut Ghosh (2011) bahwa biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan pemerintah/ BUMN lebih rendah dibandingkan dengan biaya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan BUMS. Desender, *et al.* (2009) menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan perusahaan dengan fee audit. Hasil ini didukung penelitian Ghosh menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara tipe kepemilikan dan audit fee. Khan (2009) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga membayar audit fee lebih tinggi dan

cenderung akan menunjuk KAP *Big Four*, untuk menjaga kualitas audit dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini menjadi salah satu alasan variabel tipe kepemilikan ini untuk di uji di Indonesia karena hanya beberapa penelitian yang melakukannya. Dimana BUMN merupakan perusahaan yang dikelola pemerintah akan menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan KAP dan *audit fee*. Proksi selanjutnya untuk variabel tipe kepemilikan adalah tipe kepemilikan institusional, dimana sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh pihak institusional. Pihak institusional tersebut adalah kepemilikan institusional perusahaan seperti bank, dana pensiun, lembaga asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Investor institusional menjadi partisipan lebih aktif dalam tata kelola kepemilikan perusahaan mereka (Monks dan Minow, 1995, dalam wahab). Investor institusional menuntut upaya audit yang lebih baik dari auditor eksternal untuk memantau manajemen dan pemegang saham mayoritas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Ghosh (2010), dimana akan menguji pengaruh tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap pemilihan auditor dan audit fees. Karena penelitian ini akan menguji tipe kepemilikan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan proksi BUMN dan institusional akan mempengaruhi pemilihan KAP dan *audit fees*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ghosh hanya menggunakan periode penelitian satu tahun. Namun dalam penelitian ini menggunakan periode waktu tiga tahun selama 2011-2013, yang diharapkan dapat menggambarkan pengaruh dari tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap pemilihan KAP dan fee audit. Penelitian ini juga tidak menggunakan variabel multiple auditor, karena variabel ini tidak sesuai dengan

penelitian ini, dalam penelitian yang dilakukan Ghosh (2010) juga mengatakan masalah multiple auditor belum memadai untuk digunakan dalam literatur. Pada variabel pemilihan KAP dalam penelitian ini dibagi menjadi Big4 dan non-Big4, berbeda dengan penelitian Ghosh yang menggunakan auditor domestik dan asing. Penggunaan beberapa variabel kontrol dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini tidak bisa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul "PENGARUH TIPE KEPEMILIKAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PEMILIHAN KAP DAN PENETAPAN *FEE* AUDIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2013)"

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pengaruh tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap pemilihan KAP dan penetapan fee audit, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh tipe kepemilikan terhadap pemilihan KAP?
2. Apakah pengaruh manajemen laba terhadap pemilihan KAP?
3. Apakah pengaruh tipe kepemilikan terhadap penetapan *fee* audit?
4. Apakah pengaruh manajemen laba terhadap penetapan *fee* audit?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi audit fee, antara lain :

1. Untuk menganalisis pengaruh tipe kepemilikan terhadap pemilihan KAP
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap pemilihan KAP
3. Untuk menganalisis pengaruh tipe kepemilikan terhadap penetapan *fee* audit
4. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap penetapan *fee* audit

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat Praktis

1. Hasil kesimpulan dari penelitian ini diharapkan akan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan KAP dan *fee* audit.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan KAP dan *fee* audit.

Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan terhadap literatur akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian selanjutnya dan mampu menyempurnakan dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari diadakannya penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan penjelasan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian menjelaskan tentang variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Teory*)

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Sebuah perusahaan yang menjalankan bisnisnya membutuhkan pihak terkait untuk mengelolanya. Hal ini mengenai hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) akan dibahas dalam teori agensi. Adanya hubungan timbal balik antara pemegang saham dan manajer yang baik akan mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan. Manajer bertanggungjawab untuk mengelola modal/dana yang diberikan oleh *principal* untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh pemegang saham. Sebagai manajer (*agent*) akan memperoleh imbalan berupa kompensasi dari *principal* yang tertera dalam kontrak. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen and Meckling, 1976).

Masalah yang terjadi dalam hubungan antara investor (*principal*) dan manajer (*agent*) adalah konflik keagenan. Adanya perbedaan kepentingan antara investor dan manajer akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh manajemen. *Agency theory* berasumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Widyaningdyah, 2001). Dua hal yang

mendasari teori keagenan. Pertama, hubungan antara principal dan agent yang sering berakhir dengan asimetri informasi (*information asymmetry*) antara kedua belah pihak kedua, terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi antara principal dan agent karena perbedaan tujuan di antara keduanya (Sawyer et al. 2003).

Asymmetric information timbul karena informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak, yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya (antara *principal* dan *agent*). Menurut (Hendrikson, 1992) asimetri informasi adalah situasi dimana tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak dan sebagai akibatnya, konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut. Ada dua tipe dari *asymmetric information*, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Dimana pada *adverse selection*, salah satu pihak merasa memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pihak lain. Pihak tersebut tidak akan mau melakukan perjanjian dan akan mau melakukan perjanjian dan akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat serta biaya yang sangat tinggi. Tipe kedua, *moral hazard* terjadi apabila manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan mengakibatkan penurunan kesejahteraan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Masalah keagenan yang terjadi timbul karena *asymmetric information* dan konflik kepentingan akan memunculkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung oleh perusahaan. Perbedaan kepentingan yang diakibatkan oleh konflik keagenan yang terus menerus akan merugikan semua pihak. Pengawasan sangat diperlukan untuk mengurangi konflik keagenan yang terjadi dalam suatu

perusahaan. *Principal* dan *agent* harus bisa mengurangi tindakan yang memetingkan diri sendiri dan menyelaraskan kepentingan mereka untuk tercipta tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan *corporate governance* akan mengawasi dan mengendalikan perusahaan agar berjalan selaras antara berbagai pihak. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali investasi dengan wajar, tepat, dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan (The Cadbury Committee 1992). Adanya *corporate governance* akan memberikan rasa percaya investor (*principal*) atas kerja dari manajemen (*agent*) dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik keagenan.

Tipe kepemilikan dalam perusahaan terbagi menjadi beberapa pemegang saham. Pemegang saham mayoritas biasanya memiliki peran dalam menentukan keputusan perusahaan dan mengawasi manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Disinilah biasanya terjadi masalah keagenan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Manajemen yang melaksanakan kegiatan usaha setiap hari terkadang melakukan hal yang menguntungkan dirinya sendiri, maka pengawasan dan pengendalian sangat perlu dilakukan. Salah satu tindakan yang sering dianggap sebagai cara untuk memperoleh keuntungan sendiri bagi manajemen adalah manajemen laba. Dimana manajemen laba dilakukan dengan cara memanfaatkan metode dan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Manajemen laba yang dilakukan manajer terkadang mengandung unsur kecurangan, ini yang menyebabkan *principal* tidak percaya

mengenai unsur laporan keuangan. Perlunya pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan dengan melakukan periakatan dengan auditor eskternal dengan menilai tingkat kewajaran dari laporan keuangan.

2.1.2 Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik akan tercipta dengan menerapkan sistem corporate governance. Penerapan corporate governance akan memberikan pengawasan dan pengendalian serta megarahkan kebijakan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Corporate Governance akan mengatur hubungan antara investor, kreditor, manajemen, pemertintah serta pihak-pihak yang terkati dengan perusahaan. Pada prinsipnya corporate governance berhubungan dengan kepentingan para investor, perlakuan yang sama terhadap investor, peranan semua pihak yag berkepentingan (*stakeholders*) dalam corporate governance, tranparansi, dan penjelasan serta peranan dewan komisaris dan komite audit (Alison, 2010).

2.1.3 Definisi Corporate Governance

Good corporate governance adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholders* organisasi tersebut (Pratolo, 2007). Berdasarkan definisi oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), corporate governance adalah “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan

ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Organization for Economic Corporation and Developmnet (OECD) menyatakan bahwa corporate governacne merupakan perusahaan (manajemen) bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. OECD juga mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance” (OECD, 1999:9).

Pengertian lain *corporate governance* menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal danPembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000tentang Pengembangan PraktikGCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Arifin (2005), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkandalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjagakepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Jadi inti dari corporate governance adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit serta pihak lain yang terkait terhadap manajemen perusahaan, agar pihak manajer bertindak sesuai kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Diharapkan

dengan adanya penerapan corporate governance hubungan yang selaras antara principal dan agent dapat tercapai.

2.1.4 Prinsip Good Corporate Governance

Penerapan good corporate governance menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehinggamasing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5 Tipe Kepemilikan

Kepemilikan perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang tentang BUMN berisi mengenai hal sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Negara menurut UU No. 19

Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
2. mengejar keuntungan
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi kesalahan maupun kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusional cenderung lebih mengetahui keadaan keuangan perusahaan, karena investor institusional sering disebut investor yang canggih (*sophisticated*) dan mengetahui keadaan ekonomi yang bisa memprediksi laba di masa datang

Pozen (1994) mengatakan bahwa investor institusional terbagi menjadi 2 yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor aktif adalah investor yang ingin terlibat dalam keputusan manajerial, sedangkan investor pasif tidak ingin terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial.

2.1.7 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi tertentu oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu (Scott, 2000). Konsep manajemen laba ini sesuai dengan pendapat Davidson, Stickney, dan Weil dalam Sulistyanto (2008) yang menyatakan manajemen laba merupakan suatu proses pengambil langkah

tertentu yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

Manajemen laba (*earning management*) adalah tindakan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan memanfaatkan kelonggaran pemilihan metode akuntansi, dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. *Earning management* merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan (Setyawati, 2000). Konsep *earning management* menurut Salno dan Baridwan (2000) menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa ”praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya”.

Healy dan Wehlen (1998) menyatakan manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk merekayasa laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Dimana manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode dalam mencatat transaksi akuntansi. Perilaku oportunistik manajer dalam menentukan metode dan kebijakan akuntansi tertentu bertujuan untuk menaikkan, menurunkan, dan pemerataan laba.

2.1.8 Faktor-faktor Penyebab Manajemen Laba

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama para manajer melakukan manajemen laba. Menurut Gumanti (2000) ada tiga faktor penyebab adanya praktik manajemen laba, yaitu :

1. Manajemen Akrual

Manajemen laba biasanya dikaitkan dengan semua aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer.

2. Penerapan Suatu Kebijakan Akuntansi yang Wajib

Manajemen laba berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu menerapkan lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.

3. Perubahan Akuntansi secara sukarela

Manajemen laba berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

2.1.9 Motivasi dan Pola Manajemen Laba

Faktor-faktor yang memotivasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba menurut Scott (2001), yaitu :

1. *Bonus Purposes*

Manajer perusahaan yang mendapatkan *bonus plans* akan memilih kebijakan akuntansi yang sedikit *konservatif* dibanding dengan manajer

perusahaan tanpa *bonus plans*. Manajer dengan *bonus plans* akan menghindari metode akuntansi yang mungkin melaporkan *net income* lebih rendah, manajer menggunakan laba akuntansi untuk menentukan besarnya bonus dan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan bonus.

2. *Political Motivations*

Aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan. Khususnya perusahaan besar dan industri strategis, karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Perusahaan yang berkecimpung di bidang penyediaan fasilitas bagi kepentingan orang banyak seperti listrik, air, telekomunikasi, dan sarana infrastruktur, secara politis akan mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi labanya yang di laporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. *Taxation Motivations*

Besarnya beban pajak penghasilan yang harus di tanggung membuat perpajakan menjadi salah satu alasan utama perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. Sebagai contoh cara yang

dilakukan misalnya mengubah metode persediaan menjadi LIFO agar laba bersih yang dihasilkan rendah.

4. Pergantian Direksi

Beragam motivasi timbul di sekitar waktu pergantian direksi. Sebagai contoh, direksi yang mendekati masa akhir penugasan atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian juga dengan direksi yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah terjadinya pemecatan oleh pemegang saham.

5. *Initial Public Offering (IPO)*

Pada dasarnya perusahaan yang pertama kali menawarkan sahamnya di pasar modal belum mempunyai harga pasar, sehingga memiliki masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Informasi laba bersih dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi atas sahamnya.

6. Pentingnya memberi Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

7. Kontrak Hutang Jangka Panjang

Untuk kebutuhan pendanaan perusahaan, pihak manajemen akan mengusahakan kredit dari pihak ketiga. Pihak manajemen bersama-sama

dengan pihak kreditur akan menandatangani kontrak hutang. Kontrak hutang ini bertujuan untuk melindungi kreditur dari tindakan manajemen yang bertentangan dengan kepentingan kreditur. Pelanggaran terhadap kontrak hutang akan menimbulkan biaya besar, karena itu perusahaan akan berusaha untuk menghindari kondisi yang dianggap melanggar kontrak. Manajemen laba dapat digunakan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan dalam kondisi yang melanggar kontrak hutang tersebut dan mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default*.

Scott (2003) juga mengatakan berbagai pola manajemen laba yang sering dilakukan adalah :

1. *Taking a bath*

Terjadi apabila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu, manajemen harus menghapus beberapa aset dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan *clear the desk*, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.

2. *Income minimization*

Bentuk ini mirip dengan ”*taking a bath*”, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aset tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi.

3. *Income maximization*

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin akan memaksimalkan pendapatan.

4. *Income smoothing*

Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.1.10 Kantor Akuntan Publik

Menurut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001, kantor akuntan publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Dalam melakukan perikatan audit, kantor akuntan publik harus independen dan profesional dalam mendeteksi adanya kecurangan atau penyimpangan dalam proses pelaporan keuangan. Menurut Mulyadi (2002), auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.

Variabel *fee* audit diukur dengan menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Supriyono (1988) dalam Fuad (2012) dengan empat pertanyaan mengenai *fee* audit yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) cenderung menerima klien dengan *fee* besar.
2. Audit *fee* yang besar akan meningkatkan tanggung jawab.
3. Kantor Akuntan Publik (KAP) akan mengaudit badan usaha dengan risiko tinggi apabila mendapatkan *fee* yang besar.
4. Besar kecilnya *fee* akan mempengaruhi tanggung jawab.

Kantor akuntan publik di Indonesia terdiri dari Big4 dan non Big4. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam Big4 akan memberikan kualitas audit yang baik daripada kantor akuntan publik non Big4.

2.1.11 *Fee Audit*

Fee audit adalah imbalan/ honor yang diterima oleh akuntan publik atas jasa audit yang diberikannya kepada klien. Iskak (1999) mendefinisikan *fee* audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini auditor dalam menerima imbal jasa tetap memperhatikan independensi dan tidak memihak pada klien.

DeAngelo dalam Halim (2005) menyatakan bahwa *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Menurut surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia nomor KEP.24/I-API/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Menurut surat keputusan IAPI, dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a) Kebutuhan Klien
- b) Tugas dan tanggungjawab menurut hukum (statutory duties)
- c) Independensi

- d) Tingkat Keahlian (*levels of expertise*) dan tanggungjawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan
- e) Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya menyelesaikan pekerjaan
- f) Basis penetapan *fee* yang disepakati

Simunic (2006) menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries, foreign listed*). Menurut Suharli dan Nurlaelah (2008) ukuran perusahaan, rasio konsentrasi perusahaan mempunyai pengaruh dalam penentuan besarnya *audit fee*. Namun, dalam penelitian Ghosh (2010) *audit fee* dipengaruhi oleh perusahaan yang besar dengan banyak grup afiliasi, tingginya masalah likuiditas perusahaan, dan perusahaan yang merupakan perusahaan daerah akan membayar *audit fee* nya lebih tinggi. Imbal jasa yang diberikan kepada akuntan publik berbeda-beda setiap perikatan, karena faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *fee* tergantung dari kondisi setiap perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Yatim et al (2006)

Yatim et al melakukan penelitian dengan menganalisis 736 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2003. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *audit fees*. Hasil

penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh pribumi (bumiputera) berpegaruh negatif terhadap *audit fees*.

Kamal Naser (2007)

Penelitian yang dilakukan Kamal Naser pada tahun 2007 menunjukkan hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan *corporate complexity* berpengaruh signifikan terhadap besarnya *audit fees*. Sedangkan ROE, YEND, dan TLAG tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fees*.

Suharli dan Nurlaelah (2008)

Penelitian yang dilakukan Suharli dan Nurlaelah mengambil objek penelitian pada perusahaan BUMN pada periode 2002-2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio konsentrasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan pada besarnya *audit fees*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran KAP dan jumlah anak perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan pada penetapan *audit fees*.

Khan (2009)

Khan melakukan penelitian di Australia mengenai pengaruh kepemilikan perusahaan oleh keluarga terhadap audit fee dan pemilihan auditor. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga akan membayar audit fee lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki oleh non-keluarga. Untuk menjaga kualitas audit perusahaan keluarga cenderung memilih KAP big four dalam mengaudit laporan keuangan.

Ghosh (2010)

Penelitian yang dilakukan Ghosh mengambil objek penelitian perusahaan manufaktur di India yang terdaftar pada Bursa Efek India tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat manajemen laba yang tinggi kemungkinan kecil diaudit oleh auditor domestik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *auditfees* yang dibayarkan lebih tinggi ketika perusahaan melakukan manajemen laba.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, berikut ini penjelasan mengenai ringkasan penelitian terdahulu pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

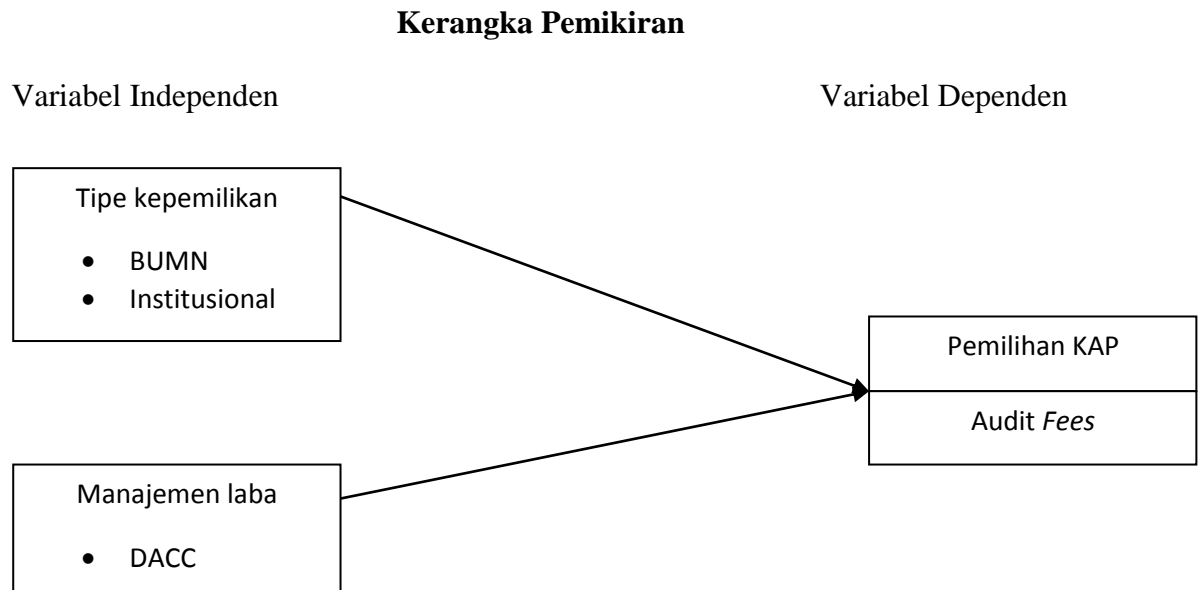
No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil
1.	Yatim et al (2006)	Y : Audit Fee X : X1: BoardIndependence X2: BoardSize X3: RMC X4: BoardMeet X5: Dual X6: ACIndependence X7: ACExpertise X8: ACMeet X9: ACSize X10: BumiOwned C : C1: SUBS C2: REC C3: INV C4: SIZE C5: LEV C6: ROA C7: BIG4 C8: INDUSTRY	Uji Regresi Berganda	X1 → Y = sig + X2 → Y = tdk sig X3 → Y = tdk sig X4 → Y = tdk sig X5 → Y = tdk sig X6 → Y = td sig X7 → Y = sig + X8 → Y = sig + X9 → Y = tdk sig X10 → Y = sig - C1 sig + C2 sig + C3 sig + C4 sig + C5 sig + C6 sig - C7 sig + C8 tsk sig
2.	Kamal Naser (2007)	Y : Audit Fee X : X11: size X12: ukuran KAP X13 : corporate complexitdk sigy (REC	Analisis OLS	X11 → Y = sig X12 → Y = sig X13 → Y = sig X14 → Y = sig X16 → Y = sig X15 → Y = tdk

		and INV) X14: industry X15: ROE X16: risk X17: YEND X18: TLAG		sig X17 → Y = tdk sig X18 → Y = tdk sig
3.	Suharli dan Nurlaelah (2008)	Y : Audit fee X : X14: rasio konsentrasi X12: ukuran KAP X11: ukuran perusahaan X15: anak perusahaan	Regresi berganda	X14 → Y = sig X12 → Y = tdk sig X11 → Y = sig + X15 → Y = tdk sig
4.	Arifur Khan(2010)	Y : audit fee Y2: pemilihan auditor X : X19: tipe kepemilikan	Regresi berganda Regresi logistik	X19 → Y2 = sig + X19 → Y = sig +
5.	Ghosh (2010)	Y : Audit fee Y2: Pemilihan auditor Y3: Multiple auditor X : X19: tipe kepemilikan X20 : manajemen laba C : C4: Size C9: Age C1: Subs C10: Overseas C6: Roa C5: Lev C11 Tangible C8: Industry	Regresi logistik Regresi berganda	X19 → Y = sig X20 → Y = sig + X19 → Y2 = sig X20 → Y2 = sig X19 → Y3 = sig X20 → Y3 = sig

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguji pengaruh tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap pemilihan KAP dan *fee* audit. Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, variabel independen penelitian ini adalah tipe kepemilikan dan manajemen laba, variabel dependen adalah pemilihan KAP dan *fee* audit. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, anak perusahaan, leverage dan *return on assets*. Maka hipotesis

berdasarkan pemikiran dari peneliti, akan digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil sementara berdasarkan pemikiran dan teori yang belum teruji kebenarannya. Hipotesis digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan membantu dalam pembuatan rancangan kesimpulan. Penelitian ini akan menguji pengaruh tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap pemilihan KAP dan *audit fees*, maka hipotesis yang dapat dijelaskan berdasarkan landasan teori dan peneliti terdahulu sebagai berikut.

2.4.1 Tipe Kepemilikan terhadap Pemilihan KAP

BUMN merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam menjalankan usaha BUMN sangat

kebijakan perusahaan ada campur tangan dari pemerintah. Selain mencari keuntungan, tujuan perusahaan BUMN adalah untuk memajukan perekonomian nasional dan mensejahterakan warga Indonesia.

Perusahaan BUMN tidak terlepas dari unsur politik didalamnya, dimana perusahaan BUMN dijalankan oleh pemerintah. Dengan adanya unsur pemerintah, BUMN lebih cenderung memilih KAP non-big4 untuk mengaudit laporan keuangannya. Dalam penelitian Ghosh (2012) mengatakan dengan adanya tujuan-tujuan politik dalam perusahaan BUMN, ada sedikit alasan BUMN mungkin menghindari memilih KAP yang memiliki nama besar (Big4). BUMN lebih mungkin terikat dengan auditor berkualitas rendah karena mereka dapat meningkatkan modal melalui koneksi, tanpa harus mengurangi asimetri informasi dengan laporan keuangan yang lebih kredibel (Wang et al. 2008)

Tipe kepemilikan institusional merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak atau lembaga institusional. Dengan adanya investor seperti ini diharapkan perusahaan akan memiliki prospek dan tren yang positif. Hal ini diharapkan dengan adanya investor seperti ini yang telah mengetahui kondisi ekonomi dan pelaporan keuangan. Arifin (2003) mengatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan keluarga/ negara/ institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik/ tanpa pengendali utama. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak institusi dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi didalam perusahaan. Karena pihak institusi lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan monitoring, sehingga dapat mengurangi *agency cost*.

Berdasarkan argumen diatas, bahwa BUMN lebih memilih KAP dengan kualitas yang rendah, dimana kualitas KAP non-Big4 lebih rendah daripada kualitas KAP Big4. Pada kepemilikan institusional lebih cenderung akan memilih KAP Big4 dengan kualitas yang baik. dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1a : tipe kepemilikan BUMN berpengaruh negatif terhadap pemilihan KAP Big4

H1b : tipe kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pemilihan KAP Big4

2.4.2 Manajemen Laba terhadap Pemilihan KAP

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Schipper, dikutip oleh Antonia, 2008). Namun menurut beberapa peneliti manajemen laba merupakan hal yang legal, karena manajemen laba merupakan tindakan yang memanfaatkan pemiliha metode akuntansi yang digunakan. Dengan adanya praktik manajemen laba dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan (Nini, 2009).

Perusahaan yang melakukan manajemen laba, berdampak pada pengungkapan sukarela pada laporan keuangan. Seperti yang dikatakan sebelumnya praktik manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Perusahaan yang menghasilkan laporan keungan yang buruk, akan

lebih memilih KAP yang berkualitas rendah. Dalam penelitian Ghosh (2010) bahwa manajemen laba berpengaruh pada pemilihan auditor. Perusahaan yang melakukan tingkat manajemen laba yang tinggi, kemungkinan akan melakukan perikatan dengan KAP non-big4. Tendeloo dan Vanstaelen (2008) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai manajemen laba yang rendah ketika mereka terikat dengan KAP yang memiliki nama besar.

Berdasarkan argumen diatas, perusahaan yang melakukan manajemen laba akan memilih KAP yang berkualitas rendah, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan seagai berikut :

H2 : manajemen laba berpengaruh negatif terhadap pemilihan KAP Big4

2.4.3 Tipe Kepemilikan terhadap fee audit

Dalam penelitian ini tipe kepemilikan terdiri dari BUMN dan non-BUMN (swasta maupun asing). Penelitian Ghosh (2010) membagi tipe kepemilikan menjadi tiga, yaitu BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing, dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa KAP internasional kemungkinan dipilih oleh perusahaan asing. Selain itu, perusahaan asing lebih tinggi membayar *audit fees* dibandingkan dengan perusahaan BUMN.

Desender dkk. (2009) menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan perusahaan dengan *audit fees*. Hal yang sama juga dalam penelitian Ghosh (2010) menemukan bahwa biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan BUMN lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan swasta.

Dimana perusahaan termasuk kepemilikan institusional sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak atau lembaga keuangan. Pemilik perusahaan yang merupakan institusi tertentu tentunya memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan investor individual, sehingga investor institusional memiliki pengaruh yang lebih besar daripada investor individual lainnya (Abdullah, 2008). Kepemilikan institusional yang memiliki pengetahuan mengenai proses pelaporan keuangan dan keadaan ekonomi dalam perusahaan, sehingga kepemilikan institusional akan berperan aktif dalam proses pengawasan terhadap kinerja manajer. Dimana pihak institusi akan melakukan permintaan audit dengan kualitas baik untuk menjaga kualitas audit (Wahab, 2009). Dimana dengan kualitas audit yang baik, kemungkinan akan terhindar dari kesalahan dan kemungkinan tindakan penyelewengan.

Berdasarkan argumen diatas, perusahaan BUMN kemungkinan membayar audit fees lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN. Pada tipe kepemilikan institusional akan membayar fee audit lebih untuk mendapatkan kualitas audit yang baik. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3a : tipe kepemilikan BUMN berpengaruh negatif terhadap fee audit

H3b : tipe kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap fee audit

2.4.4 Manajemen Laba terhadap fee audit

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam memanfaatkan kelonggaran pemilihan metode akuntansi dalam proses pelaporan keuangan.

Kecenderungan manajemen laba akan mengurangi kredibilitas laporan keuangan. *Earning management* merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan (Setyawati, 2000). Konsep *earning management* menurut Salno dan Baridwan (2000) menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa ”praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya”.

Perusahaan dengan tingkat manajemen laba yang tinggi lebih cenderung untuk membayar *audit fees* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat manajemen laba yang rendah (van Cameghem, 2009). Dalam penelitian Ghosh (2010) mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat manajemen laba yang lebih tinggi cenderung membayar lebih *audit fees*.

Berdasarkan argumen diatas, perusahaan yang melakukan manajemen laba akan membayar audit fee lebih besar, sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap fee audit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

3.1.1.1 Pemilihan Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang memberikan jasa attestasi dan non-attestasi. Jasa attestasi, adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta attestasi lainnya. Sedangkan jasa non-attestasi, mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001 disebutkan bahwa: “KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.”

Secara umum kantor akuntan publik terdiri dari Big4 dan non-Big4. Kantor akuntan publik di Indonesia yang termasuk dalam The Big4 adalah sebagai berikut:

1. KAP Haryanto Sahari, Tanudireja, Wibisana & Co. yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).
2. KAP Osman Bing Satrio & Co, yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT).

3. KAP Purwantono, Suherman, dan Surja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E & Y).
4. KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Variabel pemilihan kantor akuntan publik diukur dengan skala nominal, perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik Big4 dilambangkan dengan angka 1 dan angka 0 untuk perusahaan yang menggunakan kantor akuntan publik non-Big4. Variabel ini dilambangkan dengan KAP dalam persamaan.

3.1.1.2 Fee Audit

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit *fee*, yang diukur dengan melihat akun *profeseional fee* dalam laporan keuangan. Audit fee adalah imbalan/ honor yang diterima oleh akuntan publik atas jasa audit yang dilakukan pada klien. Data mengenai profesional fee terdapat dalam catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Pemakaian akun *professional fees* dalam penelitian ini dikarenakan audit *fee* merupakan salah satu bagian dari *professional fees*, sehingga bisa di anggap mewakili besarnya audit *fee*. Data mengenai audit *fee* di Indonesia masih berupa *voluntary disclosures* sehingga hanya beberapa perusahaan yang mencantumkan data tersebut di dalam *annual report*, sehingga akun *professional fee* akan mewakili tentang audit fee. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari profesional fee. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan LNPROFEE di dalam persamaan.

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Tipe Kepemilikan

Variabel tipe kepemilikan dalam penelitian ini dibagi menjadi perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN (swasta). Perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan dapat dilihat dalam laporan keuangan mengenai informasi kepemilikan saham. Tipe kepemilikan menggunakan variabel *dummy* yaitu, perusahaan BUMN yang dimiliki oleh pemerintah akan diberi nilai 1, sedangkan perusahaan non BUMN akan bernilai 0. Pada persamaan variabel ini akan disimbolkan dengan BUMN. Tipe kepemilikan institusional menggunakan variabel *dummy*. Dimana kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusikeuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Perusahaan yang sebagian besar sahamnya atau mayoritas dimiliki oleh pihak/ lembaga institusi akan diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang sebagian besar tidak dimiliki oleh pihak institusi akan bernilai 0. Pada persamaan variabel ini akan disimbolkan dengan INST.

3.1.2.2 Manajemen Laba

Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan proksi *discretionary accruals*. *discretionary accruals* adalah bagian akrual yang dapat dimanipulasi oleh manajemen, dengan cara menaikkan atau mengurangi pelaporan laba akuntansi melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual. Akrual adalah semua kewajiban yang bersifat operasional yang tidak berpengaruh terhadap arus kas. Perubahan piutang dan hutang merupakan akrual, juga

perubahan persediaan. Biaya depresiasi juga merupakan akrual negatif. Akuntan memperhitungkan akrual untuk menandingkan biaya dan pendapatan melalui perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba bersih, akuntan dapat mengatur laba bersih sesuai dengan yang diharapkan (Desi, 2011).

Penghitungan manajemen laba diproksikan oleh akrual diskresioner (*discretionary accruals*) yang mencerminkan diskresi manajer dalam mempengaruhi laporan keuangan melalui akrual. Total akrual merupakan selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual (TACC) dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) *normal accruals* atau *non-discretionary accruals* (NDACC) dan (2) abnormal accruals atau discretionary accruals (DACC). Discretionary accruals (DACC) dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model. Modified Jones Model dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model lain yang ada dalam penelitian Dechow et al. (1995). Tahapan dalam menentukan discretionary accruals (DACC) adalah seperti berikut :

1. Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*), yaitu:

$$TACC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan :

TACC_{it} = Total akrual perusahaan i pada akhir tahun t

NI_{it} = Laba perusahaan (*Net Income*) i sebelum item luar biasa pada akhir tahun t

CFO_{it} = Aliran kas operasi perusahaan i pada akhir tahun t

2. Menentukan koefisien dari regresi total akrual

Akrual diskresioner merupakan perbedaan antara total akrual (TACC) dengan akrual nondiskresioner (*nondiscretionary accrual* - NDACC). Langkah awal untuk menentukan akrual nondiskresioner yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut:

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TACC_{it} = Total akrual perusahaan i pada akhir tahun t (yang dihasilkan dari perhitungan nomor 1 di atas)

TA_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan laba perusahaan (*revenue*) i pada akhir tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang bersih (*net receivable*) perusahaan i pada akhir tahun t

PPE_{it} = *Property, plant and equipment* perusahaan i pada akhir tahun t

3. Menentukan akrual nondiskresioner.

Regresi yang dilakukan di (2) menghasilkan koefisien α₁, α₂, α₃ dan α₄. Koefisien α₁, α₂, α₃ dan α₄ tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi akrual nondiskresioner melalui persamaan berikut:

$$NDACC_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

NDACC_{it} = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada akhir tahun t

4. Menentukan akrual diskresioner.

Setelah didapatkan akrual nondiskresioner, kemudian akrual diskresioner bisa dihitung dengan mengurangi total akrual (hasil perhitungan di 1) dengan akrual nondiskresioner (hasil perhitungan di 3).

$$DACC_{it} = \frac{TACC_{it}}{TA_{it} - 1} - NDACC_{it}$$

Keterangan:

$DACC_{it}$ = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada akhir tahun t

3.1.3 Variabel kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Variabel kontrol dalam penelitian ini berfungsi sebagai pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan variabel dependen dan untuk mengembangkan baseline model atau model dasar bagi audit fee, seperti yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel kontrol digunakan untuk mengurangi adanya unsur bias pada hasil penelitian. Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan akan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar dianggap mampu menghasilkan laba

dan bisa menjaga kestabilan perusahaan. Variabel indikator untuk mewakili faktor ukuran perusahaan adalah total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Hay *et al.*, 2008 dalam Widiyanti, 2009). Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan dan dilambangkan dengan LNASSETS didalam persamaan.

Anak Perusahaan

Banyaknya anak perusahaan akan menambah kompleksitas jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik, karena banyaknya transaksi yang dilakukan setiap anak perusahaan. Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan yang terdapat di dalam negeri, maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi (Halim, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Jonson (1995) menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah anak perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *fee* audit. Jumlah anak perusahaan akan mempengaruhi besarnya audit *fee*, semakin banyak anak perusahaan semakin besar pula audit *fee* yang dibayarkan. Variabel anak perusahaan akan diukur dengan variabel dummy yaitu perusahaan yang mempunyai anak perusahaan diberi kode 1 sedangkan yang tidak mempunyai anak perusahaan diberi kode 0. Anak perusahaan dan dilambangkan dengan SUBS didalam persamaan.

Rasio Utang atas Aset Perusahaan

Rasio utang atas aset perusahaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari utang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajiban

yang bersifat tetap kepada pihak lain. Variabel ini akan dilambangkan dengan LEV dalam persamaan.

Rumus :

$$LEV = \frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan :

- Kewajiban jangka panjang adalah total kewajiban perusahaan dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 periode akuntansi.
- Total aset merupakan total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud.

Return on Asset

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Variabel *Return of Assets* (ROA) adalah salah satu komponen untuk menghitung risiko audit dalam model *fee* audit (Simunic, 1980 dalam Harjinder, 2010). Variabel ini akan dilambangkan dengan ROA dalam persamaan.

Rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total aset}}$$

Keterangan :

- Laba bersih setelah pajak adalah laba perusahaan yang diperoleh dari transaksi utama perusahaan setelah dikurangi pajak.
- Total aset adalah total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, maupun aset tidak berwujud

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun penelitian yaitu periode 2011-2013
2. Perusahaan mempublikasikan financial report dan annual report yang telah diaudit oleh auditor independen selama periode 2011-2013
3. Perusahaan yang mencantumkan akun profesional fee dalam laporan keuangan tahunan periode 2011-2013
4. Perusahaan yang mencantumkan informasi mengenai penelitian dalam laporan keuangan selama periode penelitian

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder diperoleh dari data laporan keuangan dan annual report perusahaan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 dan 2012. Data laporan keuangan tahunan diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan JSX Watch serta dilengkapi data yang berasal dari laporan perusahaan yang dipublikasikan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan sumber data sekunder dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data-data ini diperoleh dari Pojok BEI Undip, ICMD, www.idx.co.id dan berbagai macam literatur yang ada.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). (Ghozali, 2009:17). Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian (struktur corporate governance, manajemen laba, dan audit fee) yaitu jumlah data, mean, median dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik agar penelitian yang akan dilakukan dapat dikatakan cukup baik. Uji asumsi klasik juga digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. terdapat beberapa model yang digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan Uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. (Ghozali, 2011 : 160). Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan:

1. Dengan analisis grafik yang dilihat dengan mendeteksi penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya. Dasar keputusannya:

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari diagonal dan / atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis statistik yang sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung.

N adalah jumlah sampel yang digunakan, jika nilai Z hitung > Z tabel, maka distribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel independen saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. (Ghozali, 2011 : 105). Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas adalah sebagai berikut :

1. Besaran korelasi antar variabel independen
 - a. Koefisien korelasi antara variabel-variabel independen harus lemah, tidak lebih besar dari 90% atau dibawah 0,90
 - b. Jika korelasi kuat antara variabel independen dengan variabel lainnya, maka hal tersebut menunjukkan terjadi multikolinieritas yang serius (Ghozali, 2011)
2. Nilai tolerance dan lawannya, variance inflation factor (VIF).

Persamaan yang digunakan :

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

Nilai cutoff yang digunakan dan dipakai untuk menandai adanya faktor-faktor multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah

multikolinieritas atau adanya hubungan korelasi variabel-variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011)

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

Dasar untuk menganalisis :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik - titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan

ada problem autokorelasi. (Ghozali, 2011). Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan uji Durbin – Watson (DW test) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Ho	Keputusan	Jika
1. Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
2. Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$d_l \leq d \leq d_u$
3. Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
4. Tidak ada autokorelasi negatif	No desicison	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
5 Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak tolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan dua alat statistik, yaitu regresi logistik dan regresi linier berganda. Regresi logistik digunakan untuk menguji variabel tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap pemilihan KAP karena variabel dependen (pemilihan KAP) merupakan variabel *dummy*. Regresi berganda (Multiple regression) karena menguji satu variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2011). Analisis ini digunakan untuk menguji hubungan antara tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap *audit fees*.

3.5.3.1 Regresi Logistik

Regresi logistik sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan, yaitu menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2011). Model analisis regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel dependen adalah variabel *dummy*. Variabel dependen pemilihan KAP merupakan variabel *dummy*, jika pemilihan KAP merupakan kelompok big four maka bernilai 1 dan jika pemilihan KAP merupakan kelompok selain big four bernilai 0. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tipe kepemilikan dan manajemen laba. Tipe kepemilikan merupakan variabel *dummy*, jika perusahaan termasuk BUMN bernilai 1 dan selain BUMN bernilai 0. Variabel independen selanjutnya adalah manajemen laba yang menggunakan proksi *discretionary accruals*.

3.5.3.1.1 Menilai Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Menurut Ghozali (2011), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan *output* dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*, dengan hipotesis :

H₀ : Model yang dihipotesiskan *fit* dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hal tersebut berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness of Fit Test Model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Sebaliknya jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* lebih dari 0,05, maka hipotesis nol (H₀) tidak dapat ditolak, yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

3.5.3.1.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai *overall fit model*, ada beberapa cara untuk melakukannya. Adapun cara untuk menilai *overall fit model* adalah sebagai berikut :

Chi Square (χ^2)

Tes statistik *chi square (χ^2)* digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood (L)* dari model adalah probabilitas bahwamodel yang dihipotesiskan menggambarkan data input (Ghozali, 2005). *L*ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif.

Penggunaan nilai χ^2 untuk keseluruhan model terhadap data dapat dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ awal (hasil *block number 0*) dengan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ akhir (hasil *block number 1*). Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$. Selanjutnya jika terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

Cox dan Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square

Nilai *Cox dan Snell's R Square* dan *Nagelkerke's R Square* menunjukkan seberapa besar variabilitas variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2011). *Cox dan Snell's R Square* merupakan suatu ukuran yang mencoba untuk meniru ukuran *R square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai *R2* pada *multiple regression*, maka digunakan *Nagelkerke R square*.

Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi pemilihan KAP yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen, dalam hal ini KAP *big four* (1) dan KAP *non big four* (0). Sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2011).

3.5.3.1.3 Pengujian Signifikansi dari Koefisien Regresi Logistik

Pada regresi logistik digunakan pula uji *wald*, dimana berfungsi untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen yang masuk ke dalam model. Oleh karena itu, jika dalam uji *wald* memperlihatkan angka signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Adapun dengan melakukan uji *wald*, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap kemungkinan perusahaan dalam pemilihan kantor akuntan publik.

3.5.3.2 Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini model statistik regresi linier berganda digunakan untuk menguji variabel tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap *audit fees*. Model analisis regresi linier berganda digunakan pada model dengan variabel dependen yang merupakan variabel metrik. Variabel dependen *audit fees* yang diukur dengan nilai logaritma natural *profesional fee* pada laporan keuangan. Variabel independen tipe kepemilikan merupakan variabel dummy, yaitu BUMN dan *non* BUMN. Variabel independen selanjutnya adalah manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accruals*.

3.5.3.2.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing – masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2005 : 87). Koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Jika variabel independen bertambah, pasti R² meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Banyak penelitian menganjurkan menggunakan nilai Adjusted R² yang dapat naik atau turun jika variabel independen ditambahkan ke dalam model. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2005 : 87) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R² negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R² = 1, maka adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika nilai R² = 0, maka adjusted R² = (1 – k) / (n – k), jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai negatif.

3.5.3.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen / terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.3.2.3 Uji Signifikansi Parameter (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara *partial* variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara *partial* variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4 Persamaan Regresi

Penelitian ini menggunakan dua model analisis statistik, yaitu regresi logistik dan regresi linier berganda. Untuk menguji pengaruh tipe kepemilikan

dan manajemen laba terhadap pemilihan KAP menggunakan persamaan regresi logistik sebagai berikut :

$$KAP = \beta_0 + \beta_1 FIRM + \beta_2 DACC + \beta_3 LNASSETS + \beta_4 SUBS + \beta_5 LEV + \beta_6 ROA + \epsilon$$

Untuk menguji pengaruh tipe kepemilikan dan manajemen laba terhadap besarnya *audit fees*, menggunakan persamaan analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$LNPROFEE = \beta_0 + \beta_1 FIRM + \beta_2 DACC + \beta_3 LNASSETS + \beta_4 SUBS + \beta_5 LEV + \beta_6 ROA + \epsilon$$

Keterangan :

KAP : variabel dummy KAP

LNPROFEE : logaritma natural dari *profesional fee*

FIRM : variabel dummy tipe kepemilikan (BUMN dan *non* BUMN)

DACC : *discretionary accruals* (proksi manajemen laba)

LNASSETS : logaritma natural dari total aset

SUBS : jumlah anak perusahaan

LEV : leverage

ROA : return on assets